



KERANGKA
KEBIJAKAN DAN PROGRAM STRATEGIS
MENUJU
KUNINGAN KABUPATEN PENDIDIKAN

Prof. Dr. M. Solehuddin, MA, M.Pd.
Rektor Universitas Pendidikan Indonesia

KERANGKA KEBIJAKAN STRATEGIS

*Pendidikan dasar
yang adil dan
merata*

*Tatakelola
pendidikan yang
Bermutu dan
Profesional.*



*Pendidikan Vokasi
dan Profesi yang
relevan*

*Pendidikan tinggi yang
unggul dan bermutu*

EMPAT PILAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN MENUJU WARGA KABUPATEN KUNINGAN YANG PRODUKTIF



Lingkup Pembangunan Sistem Pendidikan Nasional di Kabupaten Kuningan

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)
- (2) Wajib Belajar Pendidikan Dasar
- (3) Pendidikan Vokasi Dan Profesi
- (4) Daya Saing Mutu Pendidikan Tinggi
- (5) Pembinaan Kualitas Profesi Guru Dan Tendik
- (6) Manajemen Mutu Sekolah;
- (7) Pengelolaan Pendidikan Yang Bersih, Transparans Dan Akuntabel.

KEBIJAKAN DAN PROGRAM STRATEGIS PENDIDIKAN KABUPATEN KUNINGAN

**WAJIB BELAJAR
PAUD-PENDIDIKAN
MENENGAH**



4 KBIJAKAN STRATEGIS PENDIDIKAN KABUPATEN KUNINGAN

2



**PENDIDIKAN
VOKASI DAN
PROFESI**

3



**PENDIDIKAN TINGGI
YANG BERDAYA
SAING**

**TATA KELOLA
YG SEHAT DAN
AKUNTABEL**



4





1. WAJIB BELAJAR PAUD-PENDIDIKAN MENENGAH

APM SD dan SMP Kab Kuningan sudah mencapai 100 dan 95%, sehingga jalan menuju wajib belajar selama 12 tahun sudah semakin terbuka

Yang menjadi masalah angka melanjutkan dari SMP ke SM yang baru mencapai 76%, sehingga upaya menuju wajib belajar 12 tahun hanya memperluas daya tampung SMA/MA dan SMK.

Dalam lima tahun ke depan, Kabupaten Kuningan harus tetap unggul dalam perluasan dan pemerataan pendidikan dasar dengan APM SD dan SMP yang termasuk tertinggi di Jawa Barat bahkan secara nasional.

Manajemen perluasan daya tampung pendidikan dasar khususnya SMP perlu diselesaikan di setiap kecamatan dan kelurahan yang masih rendah APK-nya





PROGRAM UNGGULAN PENDIDIKAN KUNINGAN

1) “**No Child Left Behind**” pada Pendidikan dasar.

Sebagai *education for all the people*, Pendidikan dasar harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga Kabupaten Kuningan, termasuk yang kurang beruntung (*disadvantages*),

2) inovasi kebijakan penuntasan **Wajar Dikdas**

9 tahun, dengan: (1) menghilangkan hambatan biaya (*cost barriers*) (2) membangun “SD-SMP Terpadu” (3) mengembangkan pendidikan dasar alternatif untuk memperluas akses bagi anak usia sekolah 7-15 tahun (4) terus menyempurnakan sistem “zoning” layanan pendidikan dasar, peningkatan kualitas guru serta pendidikan vokasi dan kewirausahaan pada tingkat kelurahan atau kecamatan.

3) Dengan semakin

mendekati APM-SD 100%, maka dalam 3-5 tahun ke depan lulusan SD dan lulusan SMP akan meningkat dengan tajam. Pemkab perlu memperluas daya tampung sekolah menengah baik negeri maupun swasta, baik dengan mendirikan sekolah baru maupun memperluas daya tampung sekolah yang sudah ada.



PROGRAM UNGGULAN PENDIDIKAN KUNINGAN

- 4) Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun ditengarai akan menjadi kebijakan Pemerintah menjelang perubahan USPN No. 20/2003. Oleh karena itu ***angka partisipasi SMA perlu terus dipacu***, dengan menampung lulusan SMP
- 5) **Dalam waktu yang akan datang peningkatan mutu dan keunggulan Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah akan menjadi prioritas tertinggi**, sesuai dengan kurikulum sekolah yang sekarang sedang dilakukan oleh Pemerintah.

Penguatan kompetensi minimum yang memuat:

- Literasi dasar (membaca, menulis, menyimak, dan menutur), literasi digital (literasi data, literasi teknologi, dan literasi humanitas), dan numerasi dasar (*basic numerical literacy*);
- Penguatan karakter sebagai kompetensi tertinggi yang *embedded* dengan penanaman semua tingkatan kompetensi (literasi dasar, aplikasi literasi dan numerasi dalam *life skills*, dan aplikasi dan numerasi dalam melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi) yang diperhitungkan sebagai keberhasilan sekolah.



PROGRAM UNGGULAN PENDIDIKAN KUNINGAN

6) Dalam 5 tahun ke depan membangun sekolah berstandar global adalah tantangan terbesar bagi Pemkab Kuningan. Pemkab tidak boleh tanggung-tanggung dalam memacu keunggulan dan daya saing terkait: kompetensi guru; kurikulum & proses pembelajaran; lingkungan sekolah yang kondusif; serta modernisasi sumber daya pendidikan (seperti: *digital library*, infrastruktur ICT, laboratorium, dan *digital learning processes*). Pemkab Kuningan ditantang untuk menjabarkan standar pendidikan dengan mengadopsi standar global pendidikan, yang memerlukan upaya *capacity building* secara masif.

7) Kebijakan *sister school* perlu terus dikembangkan melalui pelatihan yang sistematis bagi kepala sekolah dan guru dalam suatu kerjasama sekolah-sekolah secara internasional. *Sister school* diperlukan untuk adopsi dan adaptasi standar pendidikan, mengembangkan kurikulum dan pembelajaran, digitalisasi manajemen sumberdaya, membangun *smart school*, dan CPD (*continues professional development*) untuk guru-guru, dan sejenisnya.

8) Pemkab Kuningan perlu menetapkan sistem insentif untuk memacu inovasi dalam program peningkatan mutu pendidikan. Kepala sekolah dan guru didorong untuk digitalisasi pengelolaan sekolah.



2. PENDIDIKAN VOKASI & PROFESI

Kebijakan Kab. Kuningan ke depan perlu lebih mendorong perluasan pendidikan vokasi, pendidikan profesi dan pendidikan wirausaha selepas sekolah menengah (*post secondary education*) melalaui berbagai jenis penyedia (*provider*) pendidikan formal, non-formal bahkan belajar mandiri.

Dinas Pendidikan Kab. Kuningan dapat membuka Pendidikan Vokasi yang secara khusus menyiapkan lulusan SMK dan SMA (sekitar 21,8 ribu) dan sarjana (sekitar 4000) yang menganggur untuk bekerja di luar negeri. Yang kini mulai terbuka adalah kebutuhan industri di Jepang untuk menerima lulusan-lulusan tersebut untuk bekerja pada berbagai industri yang relevan, dengan terlebih dulu diberikan penyiapan kursus bahasa Jepang selama 6-8 bulan.

Perlu dibangun lembaga pendidikan vokasi, profesi dan kewirausahaan yang secara terus-menerus menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar kerja (*market driven*); program pendidikan vokasi dapat dibuka manakala dibutuhkan dan ditutup kembali jika pasar kerja tidak membutuhkan.

Pemerintah Kabupaten Kuningan perlu mengembangkan suatu “Lembaga Pendidikan Vokasi dan Profesi yang Komprehensif” yang bukan hanya mencakup program-program Pendidikan formal (seperti SMK atau program diploma) juga kursus, pelatihan, magang bukan hanya untuk menyiapkan pekerja cakap tetapi juga pendidikan kewirausahaan yang membentuk calon pengusaha mandiri yang memiliki kepekaan terhadap peluang pasar, serta mampu berinovasi dalam sistem pemasaran.



3. PENDIDIKAN TINGGI YANG BERDAYA SAING

Kuningan adalah Kabupaten yang sudah memiliki beberapa satuan perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa cukup banyak, 10.892 orang. Hal ini adalah modal yang cukup besar bagi Kuningan menuju Kabupaten Pendidikan.

UNIKU dapat menjadi modal utama Kabupaten Kuningan untuk menerapkan pola-pola pengelolaan Pendidikan tinggi yang profesional dan efisien untuk meraih keunggulan.

Kebijakan Pemkab perlu dikonsentrasikan untuk memfasilitasi upaya peningkatan mutu dan keunggulan universitas agar sejajar dengan perguruan tinggi papan atas nasional. Daya saing PT di Kuningan cukup menggembirakan karena proporsi mahasiswa dari luar Kuningan sudah mencapai 28,73%.

Konsep *corporate higher education* perlu diterapkan dalam tatakelola PT di Kuningan, antara lain dengan konsep PTN-bh yang berlaku saat ini.

Korporatisasi universitas perlu diadopsi. Tujuannya adalah untuk mewujudkan profesionalisasi satuan pendidikan tinggi agar kelak kab Kuningan memiliki PT yang dapat bersaing secara nasional bahkan global dalam merekrut mahasiswa terbaik.

Kabupaten Kuningan sebaiknya mulai mengelola perguruan tinggi dengan penekanan pada program vokasi dan profesi. Program-program strata akademik juga diperlukan tetapi dalam jumlah yang relatif lebih sedikit ketimbang pendidikan vokasi dan profesi.

Salah satu program vokasi yang dapat dikembangkan adalah program D1 dan D2 pendidikan keperawatan yang menyiapkan mahasiswa secara khusus untuk bekerja pada beberapa *nursing industry* di Jepang.



4. TATA KELOLA YANG SEHAT

Kabupaten Kuningan memerlukan sistem informasi digital yang mencakup fungsi-fungsi pengumpulan dan pengolahan data yang dilaksanakan di dalam suatu kesatuan yang integral antara Disdik, Bappeda, OPD terkait, UPTD Kecamatan, hingga satuan pendidikan.

Perlu adanya pendayagunaan data & informasi dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan, perencanaan, pengelolaan, implementasi, hingga pengendalian program pendidikan.

Disdik Kabupaten Kuningan harus memiliki dan mengoperasikan *smart office* dalam manajemen Pendidikan.

Dalam 5 tahun ke depan, data dan informasi tentang kinerja sekolah dapat diakses bukan hanya oleh Bupati tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat luas.

Penerapan ICT ditingkatkan untuk merealisasikan manajemen pendidikan secara transparan dan akuntabel. Media on-line yang memuat informasi pelaksanaan dan keberhasilan program harus dapat diakses setiap waktu oleh publik dan semua *stake holder*.

Merintis penerapan Sistem Indikator Mutu dan Indeks Kualitas Sekolah (SINDEKS). Program ini merupakan sebuah industri Pendidikan yang dikembagkan dengan mengukur indikator yang paling utama kualitas sekolah.

Sekian, *Terima Kasih*



Prof. Dr. M. Solehuddin, MA.,M.Pd.

Rektor Universitas Pendidikan Indoensia

